

## **Studi Pemberdayaan Sosial NGO di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**Dwi Arini Nursansiw<sup>1</sup>, Rahmad Hidayat<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup>STISIP Mbojo, Bima, Indonesia

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received : 28 Februari 2022

Publish: 14 Maret 2022

---

#### **Keywords:**

Activism,  
Village,  
Inclusion,  
NGO,  
Empowerment

---

### **Abstract**

*This article discusses social activism conducted by the LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima in the realm of community empowerment in Oi Bura Village, Tambora District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province. This study is important to fully map the contribution of NGOs as one of the non-state actors in empowering the poor or disadvantaged. The task of community empowerment and/or poverty alleviation is the full responsibility of the government as mandated by the constitution in force in the Unitary State of the Republic of Indonesia. However, the role of actors and organizations outside the government sector, such as NGOs, is also very much needed in conducting such tasks for the sake of accelerating the realization of social welfare as a whole. Through a case study approach, this study focused on the current conditions of the socio-economic life of the residents of Oi Bura Village and the role of social empowerment conducted by the LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima. Elements of the organizational leaders, the implementation team for the community empowerment program, and several villagers were the subjects of the research. Referring to some field findings, it can be concluded that social activism, as done by the LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima through the "Peduli" program for two years (2014-2016) in Oi Bura Village, was significant and contributed to social awareness and community empowerment. This NGO has transferred knowledge about social inclusion, intensified the provision of basic services, and expanded access to citizen interaction with the Village Government.*

---

### **Info Artikel**

#### **Article history:**

Diterima : 28 Februari 2022

Publis : 14 Maret 2022

---

### **ABSTRACT**

Tulisan ini membahas aktivisme sosial yang dijalankan LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima dalam ranah pemberdayaan masyarakat di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kajian ini menjadi penting artinya untuk memetakan secara utuh kontribusi NGO sebagai salah satu aktor non-negara dalam memberdayakan masyarakat miskin atau tertinggal. Tugas pemberdayaan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan sebenarnya merupakan tanggung jawab penuh pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, peran aktor dan organisasi yang berada di luar sektor pemerintah, seperti NGO, juga sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas semacam itu demi akselerasi perwujudan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Melalui pendekatan studi kasus, kajian ini tertuju pada kondisi terkini kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Desa Oi Bura dan peran pemberdayaan sosial yang dijalankan LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima. Unsur pimpinan organisasi, tim pelaksana program pemberdayaan masyarakat, dan beberapa warga menjadi subyek penelitian. Mengacu pada sejumlah temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa aktivisme sosial sebagaimana dilakukan LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima melalui program "Peduli" selama dua tahun (2014-2016) di Desa Oi Bura, adalah bersifat signifikan serta kontributif menumbuhkan kesadaran sosial dan keberdayaan warga. NGO tersebut telah mentranfer pengetahuan tentang inklusi sosial, mengintensifkan pemberian layanan dasar, dan memperluas akses interaksi warga dengan Pemerintah Desa.

---

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

#### **Corresponding Author:**

**Rahmad Hidayat**

STISIP Mbojo, Bima, Indonesia

Email: rahidsmart@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Tulisan ini mengkaji aktivisme sosial yang diperankan LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima. Kajian ini menjadi penting artinya untuk memetakan secara utuh kontribusi NGO sebagai salah satu aktor non-negara dalam memberdayakan masyarakat miskin atau tertinggal. Tugas pemberdayaan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan sebenarnya merupakan tanggung jawab penuh pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, peran aktor dan organisasi yang berada di luar sektor pemerintah, seperti NGO, juga sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas semacam itu demi akselerasi perwujudan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Sebagaimana diketahui Kabupaten Bima dikategorikan sebagai salah satu kabupaten tertinggal dari 199 kabupaten tertinggal di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam dokumen Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 dan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07/PER/M-PDT/III/2007 tentang Penetapan Daerah Tertinggal di Indonesia (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, 2013). Salah satu indikator yang mencerminkan ketertinggalan Kabupaten Bima sebagai daerah otonom di Indonesia adalah dengan tingginya jumlah individu miskin yakni 118.211 jiwa atau 19.41% pada tahun 2010. Ditambah kondisi keperihatinan pada rendahnya daya beli masyarakat; rata-rata lama sekolah yang hanya mencapai 7,3 tahun (setara kelas 1 SMP); masih terdapat  $\pm$  5,33% penduduk tergolong buta huruf dan buta aksara; serta relatif rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, 2010).

Pemerintah Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan pemerintahannya masih mengalami permasalahan mendasar dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin ini dari tahun ke tahun. Kemiskinan adalah realitas sehari-hari yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat. Kemiskinan yang muncul dicirikan dengan adanya kondisi kekurangan pangan, ketidaklayakan tempat tinggal, atau ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang standar. Hal ini merupakan kondisi yang telah berlangsung cukup lama. Penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun berjalan lambat karena berbagai alasan, baik alasan ekonomi maupun hal-hal lain yang menyebabkan masyarakat sulit keluar dari status miskin, atau bahkan bertambah miskin akibat bencana alam atau kejadian tak terduga lainnya.

Untuk keluar dari kondisi ketertinggalan seperti ini, Pemerintah Kabupaten Bima telah melaksanakan berbagai upaya strategis dalam rangka pengentasan kemiskinan yang dialami masyarakat. Demi pencapaian efektivitas intervensi yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Bima kerap bermitra dengan pihak swasta dan elemen masyarakat sipil yang ada dalam pelaksanaan sejumlah program yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan sosial. Elemen masyarakat sipil yang selalu digandeng oleh otoritas lokal dalam kerja-kerja pemberdayaan sosial adalah NGO. Pemerintah Daerah sangat menyadari bahwa NGO mampu membuktikan kompetensi sebagai bagian integral dari struktur institusional yang selalu berupaya mengatasi masalah kemiskinan, pembangunan pedesaan, kesetaraan gender, konservasi lingkungan, manajemen bencana, hak asasi manusia, dan isu-isu sosial lainnya. NGO bisa dimaknai secara sederhana sebagai lembaga non-pemerintah, organisasi non-profit, dan struktur tindakan kolektif yang menyediakan sarana artikulasi kepentingan serta memberikan pelayanan (jasa) bagi masyarakat sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) atas program dan aksi nyata yang dilakukannya.

Fakta membuktikan bahwa saat ini, posisi institusi masyarakat sipil seperti NGO diasumsikan menguat. Hal ini ditopang oleh kemampuan NGO yang berusaha mentransformasi masalah-masalah sosial ke dalam isu-isu publik dan berkampanye seputar isu tersebut guna mempengaruhi kebijakan publik atau perilaku swasta (Schneller, dikutip Vileyn, 2011: 42). NGO telah membuktikan diri sebagai saluran yang paling efektif bagi individu-individu untuk berpartisipasi dalam keputusan publik. Dalam masyarakat demokratis, NGO merupakan mekanisme yang berdaya guna melalui mana warga negara diwakili dan dapat berpartisipasi

dalam pemerintah. NGO mewakili banyak profil, kepentingan, dan aspirasi yang ada dalam masyarakat, diwakili secara konsisten dan nyata dalam kehidupan publik melalui karya/kerja organisasi-organisasi tersebut (Ivancioglo, 2012: 1). NGO telah mampu bekerja dalam memperkuat suara orang-orang yang kurang beruntung dalam pembuatan keputusan, mempengaruhi media, membangun opini publik, dan melobi pembuat kebijakan (Haynes, dikutip Madon & Sahay, 2012: 13).

Studi ini bermaksud menelaah lebih jauh peran NGO dalam ranah pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), terutama masyarakat desa. NGO yang dimaksud adalah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) PCNU Kabupaten Bima. Sebagai NGO yang bergerak dalam ranah pemberdayaan masyarakat, saat ini LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima sedang melaksanakan program “Penguatan Kader Damai Lereng Tambora dan Aparat Desa dalam Mendorong Desa Inklusif” di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari program “Peduli” LAKPESDAM PBNU. Program Peduli berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia yang menggunakan pendekatan “Inklusi Sosial” sebagai usaha untuk memberdayakan masyarakat marjinal, meningkatkan kesejahteraan, dan memberantas kemiskinan. LAKPESDAM PBNU dijadikan oleh Kemenko PMK sebagai salah satu mitra nasional pelaksana program, sehingga LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima pun bisa turut terlibat di dalamnya karena faktor itu.

## 2. METODE PENELITIAN

Studi ini didesain sebagai penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) guna mencermati peran NGO dalam pemberdayaan masyarakat desa. Studi kasus merupakan studi terhadap sebuah isu yang diungkap melalui satu atau lebih kasus dalam sebuah sistem yang terbatas. Peneliti berusaha mengungkap satu sistem terbatas (satu kasus) atau sistem terbatas ganda (kasus-kasus) sepanjang waktu, melalui pengumpulan data detail dan mendalam, mencakup sumber informasi ganda (seperti observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumen & laporan), serta melaporkan sebuah deskripsi kasus dan tema-tema berbasis kasus (Creswell, 2007: 73).

Subyek yang diposisikan sebagai informan dalam riset ini adalah unsur pimpinan dan tim pelaksana program pemberdayaan masyarakat “LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima” serta sejumlah warga penerima manfaat. Dengan menjadikan mereka sebagai informan, penulis berharap informasi detil perihal kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Oi Bura serta dinamika pelaksanaan program oleh LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima di desa tersebut bisa diperoleh dan dapat digunakan kemudian untuk semakin menguatkan validitas temuan riset.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Tambora terletak di lereng Gunung Tambora. Gunung yang pernah menjadi fenomena saat 200 tahun yang lalu terjadi erupsi dan sempat membuat sebagian besar wilayah Asia dan Eropa gelap sampai beberapa bulan, karena abu vulkaniknya bertebaran. Kecamatan ini terdiri atas 7 desa yang penduduknya menganut agama Islam, Katolik dan Hindu, di mana kuantitas warga beragama Islam sangat dominan. Total penduduk Kecamatan Tambora pada tahun 2012 berjumlah 8.616 jiwa atau sekitar 2.150 KK. Jumlah tersebut hanya sekitar 2 persen dari total penduduk Kabupaten Bima di tahun 2012 yakni sebesar 537.593 jiwa. Sementara, jumlah penduduk Desa Oi Bura adalah sekitar 650 jiwa atau 160 Kepala Keluarga (KK), di mana 16 KK atau sepuluh persennya adalah pemeluk Agama Hindu. Secara geografis, Desa Oi Bura memiliki batas wilayah, di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Labuhan Kananga, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pancasila Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, Sebelah Barat berbatasan dengan Laut, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Tambora.

Program LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima mengangkat isu “Penguatan Kader Damai Lereng Tambora dan Aparat Desa dalam Mendorong Desa Inklusif”. Penerima manfaat langsung program pemberdayaan ini adalah masyarakat Desa Oi Bura dan penerima manfaat tidak langsung adalah masyarakat Kecamatan Tambora secara umum. Program dilaksanakan selama dua tahun, yakni mulai akhir Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 atas kerjasama LAKPESDAM PBNU dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan (Kemenko PMK) Republik Indonesia dan The Asia Foundation (TAF). LAKPESDAM PBNU kemudian mempercayakan LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima sebagai salah satu dari 13 pelaksana program tersebut di Indonesia.

Pemilihan Desa Oi Bura oleh LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima sebagai tempat pelaksanaan program adalah dilatari sejumlah faktor mendasar berupa tingkat kemiskinan yang tinggi, ketidaklayakan kondisi infrastruktur penunjang aktivitas dan mobilitas warga desa, ketiadaan kepemilikan identitas kependudukan sebagian besar orang, ketidakseriusan perhatian pemerintah daerah dalam pendayagunaan potensi desa, serta kenihilan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Persoalan semacam ini menyebabkan Desa Oi Bura sangat jauh tertinggal dibanding desa-desa lainnya di Kabupaten Bima. Program ini berorientasi membangun tatanan sosial yang kuat dan sinergis antara masyarakat dengan organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan program pembangunan desa secara demokratis tanpa adanya diskriminasi agama-sosial-pendidikan. Selain itu, mayoritas kegiatan yang dilaksanakan berkelindan erat dengan pengawalan substansi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Wawancara dengan Asrul Raman, Ketua LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima, pada 16 Mei 2017).

Orientasi tersebut diderivasi ke dalam beberapa tujuan (1) mendorong Kader Damai Lereng Tambora memiliki pemahaman kritis, berpartisipasi aktif dan mensinergikan kekuatan masyarakat sipil dalam mendorong proses pembangunan inklusif untuk mewujudkan tata sosial yang harmonis; (2) meningkatkan kapasitas dan kesadaran kritis tim pelaksana program dalam mengelola program dan melakukan gerakan partisipatif dalam perencanaan serta pengelolaan pembangunan; (3) membangun kesadaran inklusi sekaligus mendorong Kader Damai Lereng Tambora memahami teknik fasilitasi, teknik pencegahan konflik, pendataan potensi desa, perencanaan pembangunan desa, dan konsep sinergisitas dalam pencegahan dini konflik; (4) membangun kesadaran dan pemahaman aparat desa dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan secara partisipatif dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan untuk semua pihak tanpa diskriminasi berlatar agama-etnis; (5) menyediakan ruang komunikasi, konsolidasi, dan berbagi pengalaman untuk segenap Kader Damai Lereng Tambora dalam mengembangkan praktek-praktek inklusi; (6) mendorong peran aktif Kader Damai Lereng Tambora dalam menggerakkan pembangunan partisipatif tanpa diskriminasi; dan (7) membangun interaksi dinamis Kader Damai Lereng Tambora dengan berbagai pihak, mengambil manfaat dari pengalaman sukses dalam mendorong terwujudnya harmoni kehidupan sosial, dan mendorong Pemerintah Kabupaten Bima mereplikasi sekaligus memperluas dampak positif program “Peduli” di desa-desa lainnya (Wawancara dengan Abdul Haris, Ketua Tim Pelaksana Program, pada 16 Mei 2017).

Pelaksanaan program pemberdayaan tersebut memproduksi banyak perubahan signifikan. Masyarakat Desa Oi Bura dapat menerima dengan baik program-program yang dilakukan oleh LAKPESDAM NU Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan yang terjadi di tengah masyarakat Desa Oi Bura. Sebagai contoh, kegiatan pelayanan kesehatan gratis yang difasilitasi NGO lokal ini sangat bermanfaat bagi penduduk wilayah desa sangat terpencil dan tanpa keberadaan sarana Puskesmas, seperti Desa Oi Bura. Selain itu, layanan pengurusan identitas kependudukan yakni KTP, KK, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran pun benar-benar berguna bagi segenap individu yang belum memilikinya (Wawancara dengan Ayatullah, Ketua Pemuda Desa Oi Bura, pada 15 Mei 2017). Cerita perubahan semacam ini menjustifikasi peran penting NGO dalam memperkuat gerakan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat sipil melalui berbagai aktivitas pendampingan, penyadaran, dan advokasi.

Pemberdayaan sosial menjadi salah satu bidang garapan NGO kontemporer. Upaya pengembangan masyarakat yang dilakukan NGO menasar penguatan terapan konsep kemandirian, partisipasi, jejaring, dan pemerataan (Craig & Mayo, dikutip Huraerah, 2008: 96).

Beragam kegiatan telah berhasil dilaksanakan oleh NGO —dari pelatihan ke pemberdayaan masyarakat, dari mendiseminasi penelitian ke pengorganisasian perkumpulan rakyat— guna meningkatkan kesadaran publik serta mendorong mereka untuk menentukan posisi terhadap isu-isu globalisasi, termasuk masalah dan kesulitan yang menyertainya (Yanuar, 2008: 5). Pada kerangka pemberdayaan sosial, NGO dapat menginisiasi sejumlah kegiatan guna memberdayakan masyarakat atau mendukung pengembangan kemandirian kelompok masyarakat tertentu, yakni (1) mengidentifikasi kebutuhan kelompok lokal dan taktik penanganannya, (2) melakukan mobilisasi dan agitasi untuk usaha aktif mengejar kebutuhan yang telah diidentifikasi, (3) merumuskan kegiatan jangka panjang untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan lebih umum, (4) menghasilkan dan memobilisasi sumberdaya lokal untuk kegiatan pembangunan pedesaan, dan (5) mengatur perencanaan sekaligus pelaksanaan rangkaian kegiatan (Ralston, dikutip Anggara, 2008: 24).

Sebagai aktor non-negara, NGO mampu memainkan peran penting dalam upaya memperkuat proses demokratisasi di sebuah negara dan mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mendasar. NGO mampu memposisikan diri sebagai *representative* bagi publik yang senantiasa di atas namakan dalam setiap aktivitas advokasi dan pendampingan iteratifnya. Kerja pemberdayaannya berorientasi mengatasi masalah ketidakberdayaan dan kemiskinan masyarakat. Inti kerja pemberdayaan tersebut dapat mencakup pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi (*empowering*), dan penciptaan kemandirian.

#### 4. KESIMPULAN

Berpijak pada data temuan lapangan tentang proses, dinamika, dan dampak kegiatan pemberdayaan LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima selama dua tahun (2014-2016) di Desa Oi Bura, penulis berkesimpulan bahwa aktivisme sosial NGO lokal ini bersifat signifikan sekaligus kontributif menumbuhkan keberdayaan masyarakat. Keberadaan aktor non-negara di level lokal menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang tidak mampu bekerja sendiri dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dari berbagai aspek. Otoritas lokal mesti membangun sinergi dengan NGO untuk akselerasi pencapaian tujuan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah. Gagasan dan program strategis NGO harus didukung melalui penerbitan kebijakan akomodatif.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, K. (2008). *Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima. (2010). *Bima Dalam Angka Tahun 2010*. Kabupaten Bima: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima.
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima. (2013). *Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 726 Tahun 2006 tentang Penetapan Desa-Desa Tertinggal Kabupaten Bima*. Kabupaten Bima: Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches*. Second Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Huraerah A. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Ivancioglo, V. (2012). *The Role of Non-Governmental Organisations As a Promoter of Public Policy in Moldova*. Bucharest: National Endowment for Democracy (NED).
- Madon, S. & Sahay, S. (2002). An Information-Based Model of NGO Mediation for the Empowerment of Slum Dwellers in Bangalore. *The Information Society*, 18, 13-19.

Vileyn, M. (2011). *Democratic Legitimacy in Multi-level Political Systems: What Can They Learn from Federal Theory?* Belgia: University of Antwerp.